ASLI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

503 / 1747.B / 436.7.17 / 2018

NOMOR TDP :	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN
13.01.1.52.19481	14 Maret 2023	PEMBAHARUAN : 0 2

NAMA PERUSAHAAN :
PT RISALAH JAYA ABADI

STATUS :
KANTOR TUNGGAL

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : GUFRON MAKSUM

ALAMAT : PURWODADI UTARA NO. 26
SURABAYA

NPWP : 02.586.882.9-614.000

NOMOR TELEPON : 0313520589

FAX : 0313553253

KEGIATAN USAHA POKOK :
Jasa pengurusan transportasi (jpt)

KBLI : 52291

- Penerbitan TDP ini tidak dipungut retribusi
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap perusahaan pemegang TDP ini akan dilakukan peninjauan kembali terhadap TDP yang telah diberikan

SURABAYA, 15 Februari 2018

a.n. WALIKOTA
KEPALA DINAS
Selaku,
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108251985031006

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120005190544

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT RISALAH JAYA ABADI
2. Alamat Kantor	: JL. PURWODADI UTARA 26, Desa/Kelurahan Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60171
No. Telepon	: 0313520589
Email	: risalahabadi00@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Januari 2019
Perubahan ke-11, tanggal: 7 Februari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Februari 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*